

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan signifikan selama era reformasi pada tahun 1998, yang menyebabkan pemerintah pusat beralih ke struktur desentralisasi di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan dan mengendalikan rumah tangganya sendiri dalam hal pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta dapat menyampaikan keinginannya kepada pemerintah secara lebih efektif. Masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi pada sistem pemerintahan, tuntutan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. Akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan (Pratiwi & Wahyundara, 2020).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah maupun bagi publik. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi dalam proses pengendalian manajemen, yang meliputi perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi dimanfaatkan oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pencapaian kinerja.

Laporan keuangan juga digunakan untuk melihat baik tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah. Tata kelola pemerintah yang baik akan menghasilkan pelaporan keuangan berkualitas tinggi, yang menjadi tolak ukur kualitas sebuah laporan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi dapat dipahami, dapat dibandingkan, relevan, dan andal. Laporan keuangan digunakan pihak berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan

sebagai bahan pengambil keputusan sehingga laporan keuangan harus disajikan untuk mempermudah pembacanya bukan untuk mempersulit pembacanya.

Aspek yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tercermin dari seberapa baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mencakup sejumlah proses yang dapat dikerjakan secara manual atau dengan perangkat komputer mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Karena fungsinya dalam menilai keakuratan informasi dalam laporan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi sangat penting keberadaanya.

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pemerintah itu sendiri. Sistem pengendalian internal di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terintegrasi dimana pimpinan dan seluruh pegawai melakukan kegiatan terus-menerus yang memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Diperlukan suatu sistem pengendalian internal untuk menentukan kebijakan yang mampu mengakomodir dan menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan kegiatan, sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai alat mengkaji masalah yang ada atau berpotensi akan terjadi sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam instansi pemerintah adalah korupsi, kesalahan pencatatan administrasi, dan tidak efektif serta efisiennya pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari opini audit eksternal yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit eksternal diberikan

BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun pada pemerintah daerah. BPK mengeluarkan empat pendapat yaitu: opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), opini audit wajar dengan pengecualian (WDP), opini audit tidak wajar (TP), dan tidak memberi pendapat (TMP) (Darmawan & Darwanis, 2018). Apabila BPK memberikan suatu instansi pemerintah opini audit wajar tanpa pengecualian, maka dapat dikatakan laporan keuangan instansi tersebut berkualitas tinggi .

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diubah dengan, mendefinisikan organisasi perangkat daerah sebagai entitas dilingkungan Pemerintah Daerah yang mendukung Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Masing-masing daerah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. OPD menyajikan laporan keuangan untuk menginformasikan keadaan keuangan daerah dan semua transaksi selama satu tahun, yang berguna bagi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Kota Probolinggo merupakan OPD yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan selaku bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 Pemerintah Kota Probolinggo berturut-turut mendapatkan laporan audit dari BPK berupa opini WTP. Meskipun Kota Probolinggo telah mendapatkan predikat WTP, namun BPK menemukan beberapa permasalahan yang telah disebutkan dalam LHP BPK tahun 2019. Berdasarkan berita Radarbromo.jawapos.com (2020), terdapat beberapa permasalahan yaitu, permasalahan pertama terkait dengan penggunaan dana hibah PAUD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mematuhi kebijakan tentang uang persediaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Permasalahan ketiga sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan yang menyangkut pengelolaan kas daerah yang masih lemah. Permasalahan keempat ketentuan

akuntansi pengisian piutang yang tidak konsisten dan ketentuan akuntansi biaya dibayar dimuka tidak mematuhi standar akuntansi pemerintah.

Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan Rohmah, et al., (2020), Pratiwi & Wahyundara (2020), dan Darmawan & Darwanis (2018), membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Wulandari & Rahmat (2020) membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, terdapat perbedaan hasil penelitian yang melandasi dilakukannya penelitian kembali mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dinilai bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerima predikat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, belum tentu laporan keuangan instansi tersebut terhindar dari permasalahan dan kesalahan yang akan mengurangi nilai kualitas laporannya.

Dari latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, penelitian ini tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kota Probolinggo?

- b. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah yang sebelumnya diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kota Probolinggo.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kota Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Peneliti
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi peneliti, serta pengalaman dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Bagi Pemerintah
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Probolinggo.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta informasi tambahan yang bermanfaat dalam memperoleh materi yang sejenis.